



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH (LKjIP)
TAHUN 2024**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MINAHASA**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut jumlah, kualitas, maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara saksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan selama ini dilakukan melalui program pengaturan kelahiran atau program keluarga berkualitas (KB). Selain melalui pengaturan kelahiran, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk juga harus didukung dengan adanya penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi, dan sinergis.

Penduduk dapat menjadi aset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan bagian dari pembangunan prioritas nasional dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Pembangunan program Bangga Kencana ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa "Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal

melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi di atas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Minahasa akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Daerah.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa secara berkelanjutan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, pelaksanaan program mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan tata laksana pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, kegiatan masing-masing bidang, kegiatan UPT, kegiatan kelompok jabatan fungsional dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;

7. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
9. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
3. Penyusunan rencana program dan anggaran;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

5. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
6. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
7. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian, serta pengarsipan dan dokumentasi;
2. Mengurus kebersihan, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
3. Menyiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai dan keprotokolan;
4. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Dinas;
5. Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Dinas;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
7. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Dinas;
8. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Badan;
10. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di lingkungan Dinas; dan
11. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;

2. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
3. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
4. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
5. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
6. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
7. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
8. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan;
11. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran Subbagian Perencanaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Subbagian Perencanaan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
6. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
7. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
8. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangannya;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Perencanaan;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendampingan,

pemberdayaan masyarakat, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator Advokasi dan KIE mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
2. Menyiapkan bahan pembimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan KIE dan Penggerakan;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang advokasi dan KIE;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Koordinator Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
5. Melaksanakan pembinaan lini lapangan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang keluarga berencana; Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
5. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pengendalian dan pendistribusian Alat kontrasepsi;

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon.

(2) Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;
2. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Sub Koordinator pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
2. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita (BKB);
4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja (BKR);
5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan (BKL/R);
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pemberdayaan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dibidang kesejahteraan keluarga;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesejahteraan keluarga;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Sub Koordinator bina ketahanan keluarga mempunyai tugas:
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang ketahanan keluarga;
 2. Melakukan bahan pembimbingan dibidang ketahanan keluarga;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan keluarga;
 4. Pengkoordinasian penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
6. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mempunyai tugas:

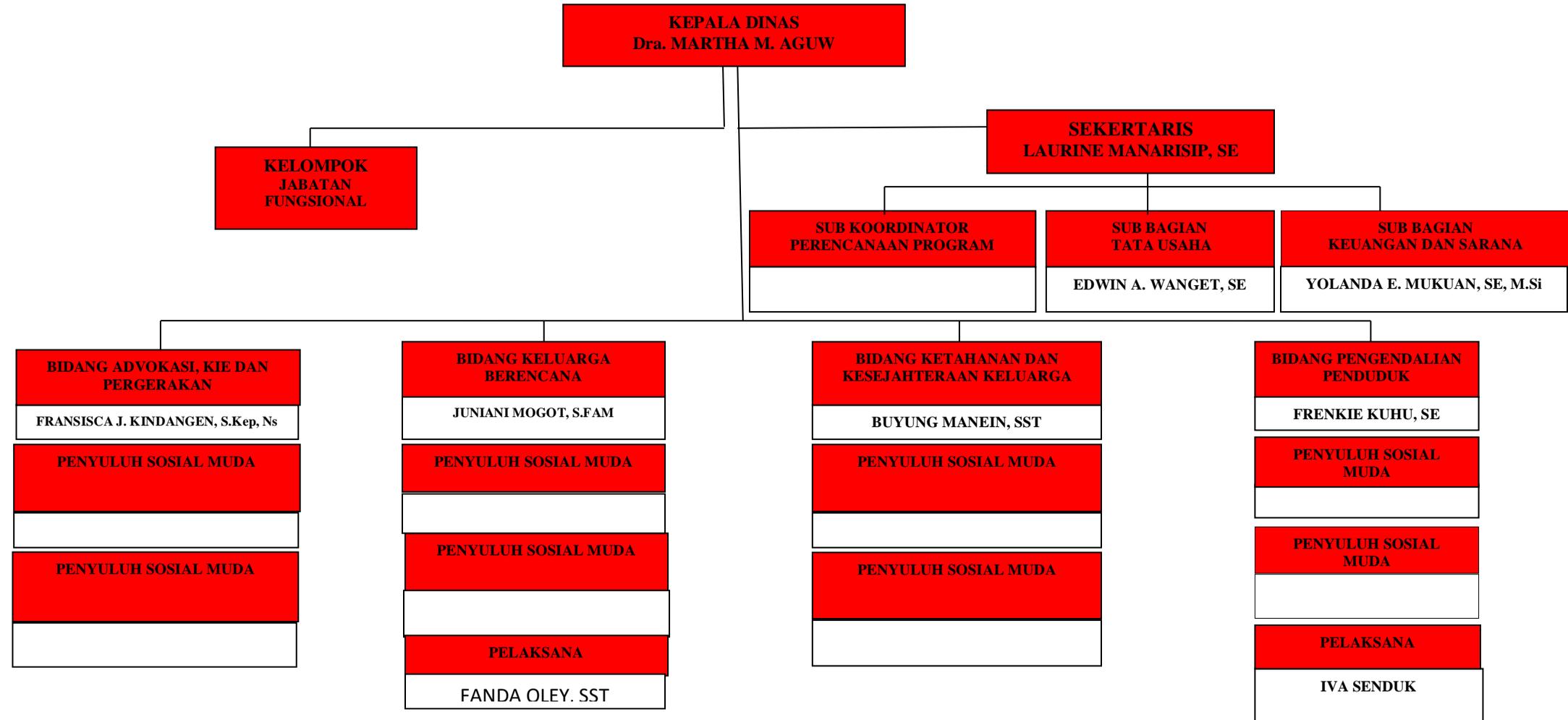
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Koordinator data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk mempunyai tugas:
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**



Kondisi kepegawaian menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-1	SLTA	
1	IV/c		1					1
2	IV/b		1					1
3	IV/a							
Jumlah Gol. IV								
4	III/d	1	5					6
5	III/c		1					1
6	III/b		1					1
7	III/a		1					1
Jumlah Gol. III								
8	II/c						1	1
Jumlah Gol II								
TOTAL		1	10				1	14

Tabel 2. Jumlah PLKB di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

No	Kecamatan	Golongan/Ruang								Total
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1.	Eris									1
2.	Remboken									1
3.	Lembean Timur									1
4.	Kombi									1
5.	Kakas								1	2
6.	Kakas Barat									1
7.	Langowan Barat									1
8.	Langowan Timur									1
9.	Langowan Selatan									1
10.	Langowan Utara							1		2
11.	Kawangkoan						1			2
12.	Kawangkoan Utara								1	2
13.	Kawangkoan Barat									1
14.	Tompaso									1
15.	Tompaso Barat									1
16.	Sonder									1
17.	Tombariri									1
18.	Tombariri Timur									1
19.	Pineleng									1
20.	Mandolang									1
21.	Tombulu									1
22.	Tondano Barat									1
23.	Tondano Timur									1
24.	Tondano Utara								1	2
25.	Tondano Selatan						1			2
Jumlah							2	1	3	39

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa
- C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis
- C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Rencana Kerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Melalui visi dan misi yang akan dicapai selama lima tahun, maka dibuat rencana kerja tahunan sebagai implementasi pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2024 dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. VISI

Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera

2. MISI

- 1) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
- 2) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.
- 3) Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- 4) Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
- 5) Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) dan Misi 5(Lima), Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Minahasa secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Sasaran : 1.1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk

1.2 Meningkatkan pembinaan keluarga berencana

1.3 Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran: 2.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tabel 3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,2
	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,09
	2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%
	3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%

Indikator kinerja kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28 org
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%
3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	77,61%
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,49%
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	34,62%
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,68%
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%

		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21
--	--	---	----

D. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dapat disajikandalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2024

Kode					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja
2	14	02			Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,1
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen
2	14	03			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,20%

						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcem), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcem), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	25 Laporan
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan

2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1212 Orang
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 Unit
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel.KB dan kespro di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	1 Laporan
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB
2	14	04			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%
2	14	04	2.01	02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Unit
2	14	04	2.01	05	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	810 Kader
2	14	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4

2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	98%
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	98%
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	91%
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah menggunakan Indikator, Target. Capaian Program Kegiatan.

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Hasil Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa Tahun 2024

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	capaian	Permasalahan	Ket
	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,2	0,47	Laju pertumbuhan penduduk rendah, sebaiknya LPP 1 untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	-	
2	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	81,14%	59,18%	Tidak semua faskes melakukan pelaporan di new siga	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,75%	30,45%	Adanya PUS yang takut menggunakan KB, merasa tidak cocok dan juga karena faktor adat budaya	

3	Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	65%	Terdapat/adanya Kelompok kegiatan yang tidak melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga karena kurangnya referensi tentang 8 fungsi keluarga	
					Kurangnya pendampingan dari Petugas Lapangan	

Indikator kinerja kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	capaian	Permasalahan	Ket
1	Meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	-	Update Data Dokumen GDPK 2024 belum selesai dibuat, rencana diperdakan pada tahapan perubahan APBD tahun 2024	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28 org	24	-	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	5	5	-	
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	5	-	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	2,15%	Jumlah PLKB yang masih kurang tidak sebanding dengan luas wilayah Kab. Minahasa	

3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31,5%	54,86%	-	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	77,61%	79,4%	-	
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,49%	0,22%	Tidak semua faskes melakukan pelaporan di new siga	
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	34,62%	20%	-	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,68%	12,08	kurangnya peserta KB Penerima bantuan iuran (PBI)	
4	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	88%	83%	Masih ada anggota poktan dan UPPKA yang masih status PUS tetapi tidak ber KB	
		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21	21,7	-	

B. EVALUASI KINERJA

Pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian belanja operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Tabel 3.2 Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Kode					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja	Realisasi
2	1	0			Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,1	2,02
2	1	0	2.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan)	1 Dokumen	0
2	1	0	2.0	0	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1	0	2.0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28	2,9

2	1 4	0 2	2.0 2	1 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1 4	0 3			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63,4%	66,8%
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,4%	5434
2	1 4	0 3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi masyarakat) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	5
2	1 4	0 3	2.0 1	0 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	1 Dokumen
2	1 4	0 3	2.0 1	0 6	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rajorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok)	25 Laporan	25 Laporan

2	1	0	2.0	0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balaipenyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balaipenyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana)	20 Laporan	25 Laporan
2	1	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar/icipes Program KKBPK (advokasi dan KIE)	37%	2,15%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	25 Unit	25 Unit
2	1	0	2.0	0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikutipenggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1470 Orang	1470 Orang
2	1	0	2.0		Pengendalian dan PendistribusianKebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	63,4%	66,8%
2	1	0	2.0	0	PengendalianPendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan
2	1	0	2.0	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikutikesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	987 Orang	1180 Orang

2	1	0	2.0	0	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	5 Unit	5 Unit
2	1	0	2.0	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pel. KB dan kespro di faskestermasuk jaringan dan jejaringnya	4 Laporan	3 Laporan
2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	5	5
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di kampung KB	45 Kampung KB	45 Kampung KB
2	1	0			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80%	65%
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	88%	83%
2	1	0	2.0	0	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Unit	31 Unit

2	1	0	2.0	0	Penyediaanbiayaoperasioanalbagipengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	Jumlahkaderpengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaanekonomikeluarga/UPPKS)	810 Kader	810 Kader
2	1	0			Program penunjangurusanpemerintahandaerah	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	4	4
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasepelaksanaankeuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%
2	1	0	2.0	0	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimagaji dan tunjangan ASN	14 Orang	14 Orang
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentaselayananumumperanghkat daerah yang terfasilitasi	98%	98%
2	1	0	2.0	0	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentaseingkatoperasionalisasipe rkantorantahunan	98%	98%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan

2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laikfungsi	91%	90%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 sebesar :

Rp 9.243.624.890

Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.073.208.326	Rp 925.747.457	86,26
Jumlah		Rp 1.073.208.326	Rp 925.747.457	Rp 1.073.208.326

Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD							
KAB. MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2024																			
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2024																			
SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1	
								Tahun					Bertambah / (Berkurang)						
								Sebelum		Setelah			Rp		%				
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah										
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								Rp8.181.185.599,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.144.014.599,00	Rp8.262.296.890,00	Rp981.328.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.243.624.890,00	Rp99.610.291,00	1.08
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp8.181.185.599,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.144.014.599,00	Rp8.262.296.890,00	Rp981.328.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.243.624.890,00	Rp99.610.291,00	1.08
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			Rp8.181.185.599,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.144.014.599,00	Rp8.262.296.890,00	Rp981.328.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.243.624.890,00	Rp99.610.291,00	1.08
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp1.825.605.599,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.825.605.599,00	Rp1.926.966.890,00	Rp18.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.465.890,00	Rp119.860.291,00	6.16
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp1.673.323.599,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.673.323.599,00	Rp1.758.184.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.758.184.890,00	Rp84.861.291,00	4.83
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.673.113.599,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.673.113.599,00	Rp1.757.974.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.757.974.890,00	Rp84.861.291,00	4.83
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp0,00	0.00

2	14	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp34.612.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.612.000,00	Rp34.612.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.612.000,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1		
								T-1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)								
									Sebelum					Setelah					Rp		%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.112.000,00	Rp20.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.112.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.000,00	Rp18.499.000,00	100.00		
2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.499.000,00	Rp18.499.000,00	100.00		
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp97.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.100.000,00	Rp113.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.600.000,00	Rp16.500.000,00	14.52		
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.600.000,00	Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.600.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.500.000,00	Rp96.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.000.000,00	Rp16.500.000,00	17.19		
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp20.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.080.000,00	Rp20.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.080.000,00	Rp0,00	0.00		
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.080.000,00	Rp11.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.080.000,00	Rp0,00	0.00		

2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rp397.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.500.000,00	Rp397.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.500.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp397.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.500.000,00	Rp397.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.500.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T-1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp217.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.500.000,00	Rp217.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.500.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Rp3.911.670.000,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.874.499.000,00	Rp3.911.670.000,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.874.499.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Rp1.847.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.847.000.000,00	Rp1.847.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.847.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBP	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.092.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.000.000,00	Rp1.092.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp375.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000.000,00	Rp375.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				Rp810.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.000.000,00	Rp810.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.000.000,00	Rp0,00	0.00	

2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp810.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.000.000,00	Rp810.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.000.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			Rp542.420.000,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.505.249.000,00	Rp542.420.000,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.505.249.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp59.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.400.000,00	Rp59.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.400.000,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah					Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp444.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp444.320.000,00	Rp444.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp444.320.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp962.829.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp38.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.700.000,00	Rp38.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.700.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp708.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.500.000,00	Rp708.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.500.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Rp2.046.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.046.410.000,00	Rp2.026.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.026.160.000,00	(Rp20.250.000,00)	(1.00)	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Rp2.001.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.001.000.000,00	Rp2.001.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.001.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00	

2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.701.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.701.000.000,00	Rp1.701.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.701.000.000,00	Rp0,00	0.00
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Rp45.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.410.000,00	Rp25.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.160.000,00	(Rp20.250.000,00)	(80.48)
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp45.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.410.000,00	Rp25.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.160.000,00	(Rp20.250.000,00)	(80.48)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2024, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
4. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis terutama disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan baik pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

Dengan demikian dalam penyusunan LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

KEPALA DINAS

Dra. Martha M. Aguw
NIP. 19680501 199703 2 009

